



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

OPTIMALISASI PERAN PELABUHAN PATIMBAN DUKUNG EKSPOR OTOMOTIF

Rafika Sari
Analisis Legislatif Ahli Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah berupaya meningkatkan peran Pelabuhan Patimban untuk mendukung peningkatan kinerja ekspor sektor otomotif. Pada tahun 2022, tingkat pertumbuhan ekspor sektor otomotif mencapai $\pm 27\%$ dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu mencapai USD10,9 miliar. Besar harapan industri ini mampu menjadi penyumbang devisa terbesar ketiga di luar minyak dan gas, di mana saat ini hanya berada pada posisi nomor 6. Pemerintah akan mendorong neraca perdagangan sektor otomotif, walaupun terjadi penyusutan surplus pada ekspornya dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun ekspor sektor otomotif tercatat sebanyak 473.602 unit, yang dilakukan oleh 11 pabrikan, yakni Astra Daihatsu, Toyota Motor, Mitsubishi Motors, Suzuki Indomobil, Hyundai Motor, Handal Motor (Hyundai), Honda Prospect, Isuzu Astra, Hino Motor, Dongfeng Sokonindo (DFSK), dan SGMW (Wuling). Industri otomotif di Indonesia dipastikan telah pulih terlihat dari pertumbuhan produksi mobil mencapai 31% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi mobil pada tahun 2022 mencapai 1.470.146 unit, sedangkan tahun 2021 sebanyak 1.121.967 unit.

Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat merupakan salah satu gerbang ekspor bagi produk otomotif, selain Pelabuhan IPCC di Jakarta. Tentunya laju ekspor otomotif Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Pelabuhan Patimban yang resmi beroperasi sejak Desember 2020. Sebelumnya, pengapalan mobil ke pasar luar negeri dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama yang dibangun dengan salah satu pertimbangan utama untuk mengurangi rantai logistik dan memperlancar arus barang, serta mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya, khususnya di wilayah Jabodetabek. Pelabuhan dilengkapi dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebanyak 218.000 mobil CBU, serta Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

Sayangnya peran Pelabuhan Patimban masih belum optimal karena PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk mencatatkan bongkar muat ekspor CBU sepanjang tahun 2022 hanya sebanyak 367.488 unit. Sementara kinerja ekspor kendaraan dari Pelabuhan Patimban hanya sebesar 64% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan mendorong kinerja ekspor Pelabuhan Patimban pada tahun 2023, salah satunya dengan menambah waktu kedatangan kapal internasional menjadi dua kali dalam seminggu. Oleh karena itu perlu adanya perluasan area untuk penumpukan sementara pada pelabuhan yang akan menjadi titik andalan ekspor mobil. Kemudian juga akan melewati rute beberapa negara di Asia, mulai dari Singapura hingga Brunei.

Selain itu, akses yang menghubungkan kawasan industri di Jawa Barat dengan Pelabuhan Patimban untuk mobilitas logistik barang juga memainkan peran penting. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun proyek jalan tol sepanjang 37,05 km ini pada Semester 2 tahun 2023 dan ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2024, usai penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan serta Perjanjian Regres Jalan Tol Akses Patimban. Pemerintah akan membangun 22,94 km dari 37,05 km jalan tol dan sisanya akan dibangun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Adanya jalan tol ini diharapkan akan meningkatkan konektivitas di Jawa Barat dan memperlancar logistik kawasan industri Karawang dan Subang menuju Pelabuhan Patimban.

Atensi DPR

Komisi V DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk bersinergi meningkatkan peran pengelolaan Pelabuhan Patimban dalam rangka mendukung kinerja ekspor industri otomotif. Pemerintah bersama dengan Komisi V DPR RI diharapkan dapat menyusun anggaran yang memadai untuk mendukung penyelesaian pembangunan jalan akses tol ke Pelabuhan Patimban secara simultan. Selain itu, Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol tersebut dengan memerhatikan kualitas, target penyelesaian, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, termasuk tingkat komponen dalam negeri yang digunakan dalam pembangunan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 27, 28 & 31 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023